**PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora**
**Vol.5, No.6, Oktober 2026**

# Optimalisasi Sinergitas Polri dan TNI AL dalam Pengamanan Maritim Terpadu Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Maritim di Wilayah Perairan Kepulauan Riau

**Yudi Arvian[1], Agus Prabowo Adi[2], Hendro Wijiantoro[3]**
[1,2,3]Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Jakarta, Indonesia
E-mail: yudiarvian20@gmail.com[1], agusprabowoadi@gmail.com[2], hendrow48mar@gmail.com[3]

**Article History:**
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

**Kata Kunci :** *Keamanan maritim; sinergitas Polri dan TNI AL; patroli terintegrasi; SWOT–AHP; BOCR; Kepulauan Riau.*

***Abstrak:*** *Perairan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional, tetapi menghadapi ancaman keamanan maritim berupa penyelundupan lintas negara, peredaran narkotika, penangkapan ikan ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut penguatan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penyelenggaraan pengamanan maritim terpadu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sinergitas kedua institusi, menentukan prioritas strategi, serta merumuskan Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) pengamanan maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis pengambilan keputusan multikriteria. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan ahli dari Polresta Barelang, Kodaeral IV Batam, dan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau. Data kualitatif diolah menggunakan NVivo 12 dan triangulasi, kemudian dianalisis melalui Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), Analytical Hierarchy Process (AHP) berbantuan Super Decisions 2.10, serta Benefits, Opportunities, Costs, and Risks (BOCR). Hasil SWOT menunjukkan posisi strategi pada Kuadran II (Strengths–Threats) dengan koordinat $X = 0{,}177$ dan $Y = -0{,}214$, yang mengarahkan pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Analisis AHP menetapkan operasional patroli sebagai kriteria utama (0,3358) dan patroli terintegrasi sebagai alternatif strategi prioritas (0,1410), dengan seluruh 30 matriks perbandingan berpasangan memenuhi batas konsistensi ($CR < 0{,}1$). Analisis BOCR menghasilkan nilai Probability of Successful Strategy sebesar 0,72, yang menunjukkan kelayakan strategi berdasarkan model penilaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergitas Polri dan TNI AL perlu*

*diprioritaskan melalui patroli bersama berbasis pemetaan ancaman, integrasi intelijen maritim, interoperabilitas teknologi pengawasan dan komunikasi, serta koordinasi penegakan hukum lintas institusi.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan wilayah laut yang luas, yang statusnya sebagai negara kepulauan telah diakui melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (United Nations, 1982), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, serta ditegaskan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah yurisdiksi laut secara menyeluruh. Laut bagi Indonesia bukan hanya jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga sumber kehidupan dan kekuatan strategis bangsa (Till, 2009). Posisi geografis Indonesia pada jalur komunikasi laut yang vital bagi perdagangan internasional menghadirkan nilai geopolitik dan geoekonomi yang tinggi sekaligus tantangan keamanan maritim yang kompleks, seperti penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, peredaran narkotika, hingga terorisme maritim.

Salah satu wilayah dengan dinamika maritim tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, yang sekitar 96 persen wilayahnya berupa perairan dan berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pelayaran, antara lain ditandai oleh volume produksi perikanan tangkap 153.218,99 ton dengan nilai Rp4,63 triliun pada semester I tahun 2024 serta peran Pelabuhan Batu Ampar yang menangani sekitar 84 persen arus peti kemas Kota Batam, secara langsung meningkatkan potensi kerawanan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Dalam menjaga keamanan wilayah perairan, Polri dan TNI AL memiliki peran strategis sesuai kewenangan masing-masing. Polri melalui fungsi kepolisian perairan (Ditpolairud) melaksanakan penegakan hukum, patroli, dan pembinaan masyarakat perairan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018, sedangkan TNI Angkatan Laut menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua institusi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan situasi keamanan maritim yang stabil dan kondusif. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan alutsista dan personel, belum optimalnya interoperabilitas komunikasi dan pertukaran informasi intelijen, perbedaan mekanisme operasi antar-institusi, serta potensi ego sektoral.

Keamanan maritim dalam kajian kontemporer tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pengamanan laut dari tindak kriminal, melainkan sebagai sistem yang menghubungkan kepentingan ekonomi, keselamatan pelayaran, penegakan hukum, dan tata kelola keamanan kawasan (Bueger, 2017). Dalam perspektif sea power, laut merupakan sumber kekuatan strategis negara yang harus dijaga untuk kepentingan nasional (Mahan, 1890). Adapun keberhasilan kolaborasi antar-lembaga tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan bersama, tetapi memerlukan tata kelola, pembagian peran, kepercayaan, dan mekanisme komunikasi yang jelas (Thomson & Perry, 2006).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi kerja sama antar-instansi berpengaruh besar terhadap efektivitas operasi keamanan laut (Ahmadi & Suharyo, 2020). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji optimalisasi strategi sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut dalam

pengamanan maritim terpadu di wilayah perairan Kepulauan Riau melalui kombinasi identifikasi faktor internal dan eksternal (SWOT), penentuan prioritas strategi (AHP), pengujian kelayakan (BOCR), dan formulasi Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) masih sangat terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi model analisis NVivo, SWOT, AHP, BOCR, KSU pada konteks sinergitas dua institusi keamanan di kawasan perairan strategis perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menentukan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi optimalisasi strategi sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut dalam pengamanan maritim terpadu, (2) menentukan prioritas strategi sinergitas, dan (3) merumuskan Kebijakan, Strategi, dan Upaya yang tepat guna mendukung stabilitas keamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Riau.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis strategis. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga memahami secara mendalam dinamika sinergitas Polri dan TNI AL dalam pengamanan maritim terpadu. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan lokus di wilayah perairan Kota Batam dan sekitarnya, Provinsi Kepulauan Riau. Unit analisis penelitian adalah Polresta Barelang, Kodaeral IV Batam, dan Ditpolairud Polda Kepri, yang dipilih karena keterlibatan langsung ketiganya dalam pengamanan maritim di perairan Kepulauan Riau.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap lima narasumber ahli yang berdinas di Polresta Barelang, Kodaeral IV Batam, dan Ditpolairud Polda Kepri, serta melalui observasi lapangan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria menduduki atau pernah menduduki jabatan pada fungsi operasi dan patroli maritim di ketiga institusi serta memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan pengamanan maritim di perairan Kepulauan Riau. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi (UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait Polri dan TNI, serta UNCLOS 1982) dan kepustakaan ilmiah. Data kualitatif diolah menggunakan perangkat lunak NVivo 12 melalui tahapan coding, analisis node, word frequency query, dan project map, kemudian divalidasi dengan triangulasi sumber. Reliabilitas pengkodean diuji menggunakan Coding Comparison Query dengan indikator persentase kesepakatan dan koefisien Cohen’s Kappa.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) serta menentukan posisi strategis melalui pembobotan IFAS-EFAS dan diagram Kartesius (Helms & Nixon, 2010). Kedua, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas strategi melalui perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar-lima kriteria dan sepuluh alternatif strategi (Saaty, 1994). Perhitungan bobot dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Super Decisions 2.10 untuk masing-masing narasumber, kemudian diagregasi menggunakan rata-rata geometrik (geomean). Konsistensi seluruh 30 matriks perbandingan berpasangan (satu matriks kriteria dan lima matriks alternatif per narasumber) diuji melalui Consistency Ratio (CR) dengan ambang batas $CR \leq 0{,}1$. Ketiga, analisis BOCR (Benefit, Opportunity, Cost, Risk) digunakan untuk menguji kelayakan strategi melalui tiga indikator, yaitu Potential Ratio ($PR = B/(B+C)$), Attractiveness Ratio ($AR = O/(O+R)$), dan Probability of Successful Strategy ($PSS = (PR+AR)/2$), dengan ambang kelayakan $PSS > 0{,}5$. Hasil ketiga analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Internal dan Eksternal (Analisis SWOT)

Hasil pengolahan data wawancara dengan NVivo 12 yang diperkuat triangulasi menghasilkan identifikasi delapan faktor pada masing-masing kategori SWOT. Faktor kekuatan utama meliputi sinergitas operasi patroli bersama, posisi strategis Kepri, ketersediaan unsur patroli, pengalaman personel dalam operasi keamanan laut, dukungan regulasi, ketersediaan pangkalan dan fasilitas pendukung, jaringan koordinasi antar-instansi, dan dukungan masyarakat pesisir. Faktor kelemahan meliputi interoperabilitas komunikasi yang belum optimal, keterbatasan pertukaran informasi intelijen, keterbatasan sarana prasarana dan teknologi patroli laut, integrasi koordinasi operasi yang belum optimal, tantangan geografis kepulauan, SOP pengamanan maritim yang belum terpadu, pemanfaatan teknologi pengawasan yang belum optimal, dan sistem respon cepat yang belum maksimal. Faktor peluang mencakup dukungan pemerintah, perkembangan teknologi pengawasan, penguatan Maritime Domain Awareness (MDA), kerja sama lintas instansi, transformasi digital, pengembangan command center terpadu, modernisasi unsur patroli, dan kerja sama regional. Faktor ancaman mencakup penyelundupan lintas negara, peredaran narkotika melalui jalur laut, illegal fishing, kompleksitas kejahatan lintas negara, tingginya aktivitas pelayaran internasional, perkembangan teknologi kejahatan maritim, keterbatasan anggaran, dan ancaman siber maritim.

Hasil pembobotan IFAS–EFAS menghasilkan koordinat X = +0,177 (selisih kekuatan dan kelemahan) dan Y = −0,214 (selisih peluang dan ancaman), sehingga posisi strategi berada pada Kuadran II diagram Kartesius, yaitu strategi diversifikasi Strengths–Threats (S–T). Posisi ini bermakna bahwa Polri dan TNI Angkatan Laut memiliki modal kekuatan internal yang cukup baik, tetapi menghadapi tekanan ancaman eksternal yang lebih dominan dibandingkan peluang. Dari perangkingan kombinasi S–T diperoleh tiga rumusan strategi teratas, yaitu S1–T1 (mengoptimalkan sinergitas operasi patroli bersama untuk mengatasi tingginya ancaman penyelundupan lintas negara; skor 0,068), S1–T2 (mengoptimalkan sinergitas operasi patroli bersama untuk mengatasi peredaran narkotika melalui jalur laut; skor 0,068), dan S1–T4 (mengoptimalkan sinergitas operasi patroli bersama untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lintas negara; skor 0,061). Temuan ini konsisten dengan karakterisasi Bueger (2017) mengenai kompleksitas ruang maritim, bahwa ancaman utama di perairan Kepri bersifat lintas batas, memanfaatkan jalur laut strategis, kondisi geografis kepulauan, dan celah pengawasan antar-wilayah.

### Prioritas Strategi Sinergitas (Analisis AHP)

Struktur hierarki AHP disusun atas tiga tingkatan: tujuan (optimalisasi strategi sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut dalam pengamanan maritim terpadu), lima kriteria (Operasional, Teknologi dan Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, Intelijen Maritim, serta Infrastruktur dan Sarana Pendukung), dan sepuluh alternatif strategi yang merupakan hasil sintesis wawancara narasumber ahli, coding NVivo 12, dan analisis SWOT. Sebelum sintesis prioritas dilakukan, konsistensi penilaian seluruh narasumber diuji. Rekapitulasi nilai Consistency Ratio disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rekapitulasi Consistency Ratio (CR) Seluruh Matriks Perbandingan Berpasangan**

| No | Narasumber | CR Kriteria | CR Alt. Infrastruktur | CR Alt. Intelijen | CR Alt. Operasional | CR Alt. SDM | CR Alt. Teknologi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli 1 | 0,0879 | 0,0584 | 0,0779 | 0,0898 | 0,0877 | 0,0314 | Konsisten |
| 2 | Ahli 2 | 0,0476 | 0,0584 | 0,0779 | 0,0646 | 0,0675 | 0,0411 | Konsisten |
| 3 | Ahli 3 | 0,0418 | 0,0598 | 0,0834 | 0,0646 | 0,0761 | 0,0524 | Konsisten |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ahli 4 | 0,0281 | 0,0635 | 0,0771 | 0,0551 | 0,0782 | 0,0490 | Konsisten |
| 5 | Ahli 5 | 0,0153 | 0,0673 | 0,0498 | 0,0789 | 0,0648 | 0,0538 | Konsisten |

Sumber: Diolah dari file model Super Decisions 2.10, 2026

Seluruh 30 matriks perbandingan berpasangan dari kelima narasumber memiliki nilai CR di bawah ambang batas 0,1 dengan nilai tertinggi 0,0898 (Ahli 1, matriks alternatif kriteria Operasional), sehingga seluruh penilaian dinyatakan konsisten dan tidak memerlukan pengulangan pengisian kuesioner. Hasil sintesis bobot per narasumber beserta agregasi geomean disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

**Tabel 2. Rekapitulasi Bobot Kriteria per Narasumber dan Geomean**

| No | Kriteria | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Geomean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operasional Patroli | 0,3840 | 0,3753 | 0,3407 | 0,2892 | 0,3007 | **0,3358** |
| 2 | Intelijen Maritim | 0,2761 | 0,2682 | 0,2839 | 0,3261 | 0,2560 | **0,2820** |
| 3 | Teknologi dan Sistem Informasi | 0,1610 | 0,1514 | 0,1442 | 0,1435 | 0,1360 | **0,1472** |
| 4 | Infrastruktur dan Sarana Pendukung | 0,1132 | 0,1270 | 0,1235 | 0,1435 | 0,2264 | **0,1467** |
| 5 | Sumber Daya Manusia | 0,0656 | 0,0780 | 0,1077 | 0,0977 | 0,0809 | **0,0860** |

Sumber: Data diolah dengan Super Decisions 2.10, 2026

**Tabel 3. Rekapitulasi Bobot Alternatif Strategi per Narasumber dan Geomean**

| No | Alternatif Strategi | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Geomean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patroli Terintegrasi | 0,1495 | 0,1471 | 0,1438 | 0,1458 | 0,1210 | **0,1410** |
| 2 | Integrasi Teknologi Komunikasi dan Pengawasan Maritim | 0,1123 | 0,1168 | 0,1262 | 0,1356 | 0,1386 | **0,1255** |
| 3 | Penegakan Hukum Maritim Tegas | 0,1348 | 0,1310 | 0,1283 | 0,1206 | 0,1123 | **0,1254** |
| 4 | Latihan Bersama Antar Institusi | 0,1134 | 0,1131 | 0,1120 | 0,1068 | 0,1263 | **0,1143** |
| 5 | Pemolisian Masyarakat Pesisir | 0,1056 | 0,1055 | 0,1083 | 0,1082 | 0,0979 | **0,1051** |
| 6 | Peningkatan Sistem Respon Cepat | 0,0967 | 0,0976 | 0,0954 | 0,1010 | 0,0961 | **0,0974** |
| 7 | Penguatan Intelijen Maritim | 0,0805 | 0,0811 | 0,0837 | 0,0838 | 0,0748 | **0,0807** |
| 8 | Maritime Command Center Terpadu (MCCT) | 0,0688 | 0,0698 | 0,0718 | 0,0710 | 0,1030 | **0,0768** |
| 9 | Modernisasi Sarana Patroli | 0,0797 | 0,0774 | 0,0694 | 0,0684 | 0,0676 | **0,0725** |
| 10 | Optimalisasi Infrastruktur Pangkalan dan Fasilitas Pendukung | 0,0587 | 0,0607 | 0,0612 | 0,0588 | 0,0624 | **0,0603** |

Sumber: Data diolah dengan Super Decisions 2.10, 2026

Pada tingkat kriteria, Operasional Patroli menjadi prioritas utama (geomean 0,3358), disusul Intelijen Maritim (0,2820), Teknologi dan Sistem Informasi (0,1472), Infrastruktur dan Sarana Pendukung (0,1467), dan Sumber Daya Manusia (0,0860). Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran unsur di laut tetap menjadi fondasi utama pengamanan maritim sebagai wujud kehadiran negara di ruang maritim strategis, tetapi harus diarahkan oleh informasi intelijen yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Nilai Infrastruktur dan Sarana Pendukung yang hampir setara dengan Teknologi dan Sistem Informasi (selisih 0,0005) mengindikasikan bahwa kedua aspek pendukung ini dipandang sama pentingnya oleh para narasumber.

Pada tingkat alternatif strategi, Patroli Terintegrasi menjadi prioritas utama (geomean 0,1410), disusul Integrasi Teknologi Komunikasi dan Pengawasan Maritim (0,1255) dan Penegakan Hukum Maritim Tegas (0,1254) yang nilainya hampir setara, kemudian Latihan Bersama Antar Institusi (0,1143). Kedekatan nilai prioritas kedua dan ketiga menunjukkan bahwa

penegakan hukum yang tegas dan integrasi teknologi komunikasi–pengawasan perlu dilaksanakan secara beriringan, karena penindakan yang efektif sangat bergantung pada sistem deteksi dan komunikasi antar-institusi yang memadai. Adapun Optimalisasi Infrastruktur Pangkalan dan Fasilitas Pendukung menempati prioritas terakhir (0,0603), yang bukan berarti tidak penting, melainkan dipandang sebagai prasyarat jangka panjang yang dampaknya tidak sesegera strategi operasional.

Hasil ini sejalan dengan kerangka kolaborasi Thomson dan Perry (2006) bahwa keberhasilan kolaborasi antar-lembaga menuntut kesamaan prosedur, kepercayaan, dan mekanisme komunikasi: patroli terintegrasi menjawab kebutuhan pengawasan terkoordinasi, penegakan hukum menjawab kebutuhan efek gentar (deterrence), sedangkan latihan bersama menjawab kebutuhan kesamaan pola tindak di lapangan.

**Kelayakan Strategi (Analisis BOCR)**

Analisis BOCR dilakukan dengan memetakan kelima kriteria hasil sintesis AHP ke dalam kategori merit berdasarkan karakteristiknya: Operasional Patroli (0,3358) dan Intelijen Maritim (0,2820) dikategorikan sebagai Benefit karena memberikan manfaat langsung terhadap efektivitas pengawasan dan deteksi dini; Teknologi dan Sistem Informasi (0,1472) sebagai Opportunity karena perkembangan teknologi pengawasan merupakan peluang eksternal; Infrastruktur dan Sarana Pendukung (0,1467) sebagai Cost karena memerlukan dukungan anggaran, pembangunan, dan pemeliharaan; serta Sumber Daya Manusia (0,0860) sebagai Risk karena perbedaan kultur organisasi, rotasi personel, dan belum meratanya kemampuan interoperabilitas dapat menjadi risiko implementasi apabila tidak dikelola. Berdasarkan pemetaan tersebut diperoleh PR = 0,6178/(0,6178+0,1467) ≈ 0,81, AR = 0,1472/(0,1472+0,0860) ≈ 0,63, dan PSS = (0,81+0,63)/2 = 0,72.

Nilai PSS sebesar 0,72 berada di atas ambang kelayakan 0,5, sehingga strategi optimalisasi sinergitas dinilai memiliki peluang keberhasilan yang baik. Namun perlu ditegaskan bahwa penerapan BOCR dalam penelitian ini merupakan adaptasi sederhana dari kerangka Saaty yang idealnya membangun empat hierarki penilaian terpisah untuk masing-masing merit. Sebagaimana diingatkan Wijnmalen (2007), penggabungan merit yang heterogen ke dalam satu ukuran gabungan dapat mengaburkan trade-off yang sesungguhnya antar-kriteria. Oleh karena itu, nilai PSS 0,72 dimaknai sebagai indikasi awal kelayakan strategi, bukan ukuran presisi final, dan dilengkapi pertimbangan kualitatif dari hasil wawancara narasumber ahli serta kondisi empiris lapangan.

**Perumusan Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU)**

Sintesis hasil SWOT (arah strategi S–T), AHP (prioritas strategi), dan BOCR (kelayakan) menghasilkan rumusan kebijakan: “Terwujudnya optimalisasi sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut dalam pengamanan maritim terpadu melalui penguatan patroli bersama terintegrasi, intelijen maritim, penegakan hukum maritim, interoperabilitas komunikasi, teknologi pengawasan, latihan bersama, dan sistem respon cepat guna menghadapi penyelundupan lintas negara, peredaran narkotika melalui jalur laut, serta kompleksitas kejahatan lintas negara dalam rangka mendukung stabilitas keamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Riau.” Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam empat strategi utama sebagai berikut.

*Strategi pertama,* mengoptimalkan operasi patroli bersama terintegrasi berbasis ancaman prioritas dan wilayah rawan. Upaya pendukungnya meliputi penyusunan peta kerawanan maritim terpadu, penetapan sektor prioritas patroli, sinkronisasi jadwal patroli Ditpolairud, Polres/Polresta pesisir, dan Kodaeral IV Batam, pelaksanaan patroli fleksibel berbasis informasi intelijen, pembentukan posko koordinasi pada wilayah rawan, mekanisme pelaporan hasil patroli terpadu,

pelibatan masyarakat pesisir sebagai jejaring informasi, dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja.

*Strategi kedua,* memperkuat intelijen maritim dan pertukaran informasi lintas institusi sebagai dasar deteksi dini dan pengambilan keputusan operasi. Upaya pendukungnya meliputi pembangunan mekanisme pertukaran informasi intelijen rutin, pengembangan database ancaman maritim terpadu, integrasi informasi masyarakat pesisir, penugasan liaison officer antar-institusi, pemanfaatan hasil analisis intelijen sebagai dasar penentuan sasaran patroli, analisis pola ancaman berkala, penguatan keamanan informasi, dan penghubungan hasil intelijen dengan fungsi penyidikan.

*Strategi ketiga,* memperkuat penegakan hukum maritim terpadu dan sistem respon cepat terhadap ancaman penyelundupan, narkotika, dan kejahatan lintas negara. Upaya pendukungnya meliputi penyusunan SOP terpadu penghentian–pemeriksaan–penindakan kapal, pembentukan tim respon cepat gabungan di wilayah rawan, penetapan standar waktu respon, penguatan koordinasi unsur patroli dengan fungsi penyidikan dan intelijen, latihan simulasi penanganan perkara maritim, mekanisme pengamanan barang bukti, koordinasi dengan Bea Cukai, Imigrasi, Bakamla, Syahbandar, dan Kejaksaan, serta evaluasi operasi penegakan hukum.

*Strategi keempat,* meningkatkan interoperabilitas komunikasi, teknologi pengawasan, latihan bersama, dan tata kelola kolaborasi pengamanan maritim terpadu. Upaya pendukungnya meliputi latihan bersama berkala berbasis skenario nyata, penetapan kanal komunikasi operasi bersama, integrasi bertahap teknologi AIS, radar, drone, CCTV pelabuhan, dan pemantauan satelit, pengembangan bertahap Maritime Command Center, peningkatan kemampuan personel, penyusunan indikator keberhasilan operasi, mekanisme evaluasi bersama, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis data yang prediktif.

*Keempat strategi,* tersebut membentuk satu kesatuan sistem berlapis: lapisan operasional (patroli terintegrasi, penegakan hukum, respon cepat), lapisan informasi (intelijen maritim, pertukaran data, teknologi pengawasan, MDA), dan lapisan kelembagaan–sosial (SOP terpadu, latihan bersama, tata kelola kolaborasi, pelibatan masyarakat pesisir). Dengan demikian, pengamanan maritim terpadu tidak dimaknai sekadar menambah frekuensi patroli, melainkan kemampuan menyatukan kehadiran negara, informasi, teknologi, hukum, masyarakat, dan kelembagaan dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, yang menggeser pola sinergitas dari hubungan koordinatif menuju kolaborasi operasional yang matang.

# KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, optimalisasi sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Kepulauan Riau dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang menempatkan posisi strategi pada Kuadran II (Strengths–Threats) dengan koordinat X = +0,177 dan Y = −0,214, yang bermakna kekuatan internal kedua institusi harus digunakan secara lebih terarah untuk menghadapi ancaman eksternal yang dominan, khususnya penyelundupan lintas negara, peredaran narkotika melalui jalur laut, dan kompleksitas kejahatan lintas negara. Kedua, hasil AHP dengan seluruh matriks konsisten (CR < 0,1) menunjukkan prioritas kriteria tertinggi pada Operasional Patroli (0,3358) disusul Intelijen Maritim (0,2820), serta prioritas alternatif strategi tertinggi pada Patroli Terintegrasi (0,1410) disusul Integrasi Teknologi Komunikasi dan Pengawasan Maritim (0,1255) dan Penegakan Hukum Maritim Tegas (0,1254); hasil BOCR dengan PSS 0,72 mengindikasikan strategi layak diterapkan. Ketiga, KSU yang dirumuskan menempatkan kebijakan penguatan sinergitas melalui empat strategi, yaitu patroli bersama terintegrasi berbasis ancaman prioritas, penguatan intelijen maritim dan pertukaran informasi lintas institusi, penguatan penegakan hukum maritim terpadu dan sistem respon cepat,

serta peningkatan interoperabilitas komunikasi, teknologi pengawasan, latihan bersama, dan tata kelola kolaborasi.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya Polri dan TNI AL menyusun peta kerawanan maritim terpadu, menyinkronkan jadwal patroli, membangun mekanisme pertukaran intelijen yang cepat dan aman, menyusun SOP terpadu, mengembangkan Maritime Command Center secara bertahap, dan memperkuat pemolisian masyarakat pesisir. Keterbatasan penelitian terletak pada lingkup unit analisis (Polresta Barelang, Kodaeral IV Batam, dan Ditpolairud Polda Kepri) serta penggunaan adaptasi BOCR yang disederhanakan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan institusi keamanan maritim lain (Bakamla, Bea Cukai, KKP) dan membangun hierarki BOCR penuh untuk menguji ketahanan (robustness) hasil prioritas strategi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A., Herdiawan, D., & Suharyo, O. S. (2020). Analisa strategi pemberdayaan komponen maritim dalam mendukung operasi keamanan laut nasional. *Rekayasa, 13*(1), 38–44. https://doi.org/10.21107/rekayasa.v13i1.5873

Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs, 93*(6), 1293–1311. https://doi.org/10.1093/ia/iix174

Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis—Where are we now? A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management, 3*(3), 215–251. https://doi.org/10.1108/17554251011064837

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.

Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown and Company.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Saaty, T. L. (1994). *Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process*. RWS Publications.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review, 66*(S1), 20–32. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x

Till, G. (2009). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (2nd ed.). Routledge.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Wijnmalen, D. J. D. (2007). Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP–ANP: A critical validation. *Mathematical and Computer Modelling, 46*(7–8), 892–905. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2007.03.020